

STRATEGI UNI SOVIET DI ASIA TIMUR DALAM TAHUN 1980-AN

Alfian MUTHALIB*

PENGANTAR

Dalam dasawarsa sesudah 1945 terdapat beberapa asimetri antara kekuatan militer dan posisi geopolitik Amerika Serikat dan Uni Soviet di dunia internasional. Berkat dorongan ahli-ahli strateginya, Amerika Serikat pada waktu itu berhasil meningkatkan kekuatan nasionalnya secara menyeluruh untuk melaksanakan suatu strategi pembendungan terhadap ekspansi Uni Soviet di dunia. Selama dasawarsa itu Amerika Serikat bertindak sebagai satu-satunya kekuatan global. Sebaliknya Uni Soviet yang banyak menderita akibat Perang Dunia II hanya mampu mencapai status kekuatan regional di Eropa. Untuk mengamankan wilayahnya ia menguasai beberapa negara Eropa Timur di sebelah baratnya.

Dalam strategi perang modern, konvensional maupun strategis, sistem pertahanan penyangga ini sudah usang, tetapi mengandung berbagai keuntungan. Pengoperasian kekuatan militer Uni Soviet dari pangkalan-pangkalan dalam negeri kurang berbahaya, cepat dan tidak memerlukan biaya besar. Tampaknya Uni Soviet cenderung mengimbangi kelemahan militernya dengan posisi geopolitik yang menguntungkan.

Menjelang akhir tahun 1960-an, gambaran kapabilitas militer Uni Soviet itu berubah seperti ditegaskan dalam pidato Leonid Brezhnev di hadapan Kongres Kelima Partai Serikat Buruh Polandia bulan Nopember 1968. Dalam pidato itu dikatakannya bahwa "perimbangan kekuatan dalam skala besar terus condong menguntungkan sosialisme dan sekutu-sekutunya."¹ Evaluasi Brezhnev itu cukup beralasan, karena jika seluruh kekuatan militer dihitung,

*Staf CSIS.

¹John Erickson, "Soviet Military Policy in the 1980's," *Current History*, Oktober 1978, Vol. 75, No. 440, hal. 27.

maka Uni Soviet hampir mencapai suatu paritas dengan Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Uni Soviet berhasil menggeser status dominasi kekuatan global Amerika Serikat.

Berbeda dengan strategi pembendungan Amerika Serikat yang semakin menurun di Asia menjelang dasawarsa 1970-an, Uni Soviet berusaha meningkatkan kemampuan militernya untuk mencapai suatu basis yang lebih luas di Asia Timur. Tampaknya strategi Uni Soviet tahun 1950-an yang lebih menekankan perjanjian bilateral dengan Cina dan Jepang dan perjanjian regional dalam bentuk sistem pertahanan bersama tahun 1960-an ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan situasi di Asia-Pasifik menjelang akhir dasawarsa 1970-an. Dalam beberapa kasus, terutama Vietnam, Kam-puchea, Yaman Selatan dan Etiopia, pengaturan-pengaturan militer didukung oleh perjanjian-perjanjian persahabatan yang meliputi kerja sama militer.

Pergeseran dari strategi politik ke strategi militer ini juga terungkap dalam peningkatan kemampuan militernya di Siberia menjelang tahun 1980-an, termasuk pembangunan suatu pangkalan armada kapal selam di Kepulauan Simshir, Sakhalin. Diperkirakan bahwa kekuatan militer Uni Soviet di Asia Timur sekarang adalah sepertiga dari seluruh kekuatan yang digelarnya di Eropa dan 25% dalam Kategori I dan II.¹ Kuantitas dan kualitas kemampuan militer Uni Soviet itu merupakan tantangan terhadap dominasi Amerika Serikat di kawasan ini. Tetapi harus dicatat bahwa perimbangan kekuatan militer di Asia-Pasifik adalah lebih kompleks daripada perimbangan kekuatan di Eropa yang hanya melibatkan Pakta Warsawa dan NATO. Suatu konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Asia-Pasifik tidak dapat dibatasi, tetapi akan melibatkan negara-negara yang bersekutu dengan kedua super-power itu.

Menurut perkiraan ahli strategi, walaupun bersekutu dengan Amerika Serikat di bawah Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat, Jepang tidak akan ikut dalam pertempuran antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di luar wilayah dan perairan teritorialnya.² Alasan ini tampaknya kurang tepat mengingat lokasi geostrategis Jepang, pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang dan penggelaran kekuatan militer Amerika Serikat dan Uni Soviet di Asia-Pasifik. Unsur-unsur strategis-militer tersebut membuat Jepang sebagai katalis dalam perimbangan kekuatan di kawasan ini.

Di bawah ini kita akan mencoba melihat perubahan strategi Uni Soviet di Asia Timur dari sudut perimbangan kekuatan di Asia-Pasifik dalam tahun 1980-an.

¹ *The Military Balance 1982-1983* (London: IISS, 1982), hal. 15.

² Naotoshi Sakonjo, "The Military Balance in East Asia and Western Pacific," Prepared for the *East Asian Conference*, Tokyo, October 22-24, 1982. *Honolulu, Hawaii*, hal. 2.

PERIMBANGAN KEKUATAN DI ASIA-PASIFIK DALAM TAHUN 1980-AN

Perimbangan kekuatan di Asia-Pasifik dalam tahun 1970-an ditandai oleh pergeseran politik superpower mengenai negara-negara di kawasan ini. *Pertama*, terjadi pendekatan Amerika Serikat-Cina seperti terungkap dalam Komunike Shanghai Pebruari 1972 dan peningkatan hubungan kerja sama dalam bidang teknik serta ekonomi antara kedua negara itu. Pendekatan kembali Amerika Serikat-Cina ini kemudian diperkuat dengan normalisasi hubungan diplomatik dan pembentukan konsensus strategis selama pemerintahan Carter tahun 1978-1979. *Kedua*, Vietnam Selatan jatuh ke tangan Vietnam Utara. *Ketiga*, posisi Uni Soviet di negara-negara komunis Indocina meningkat. *Keempat*, Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi global di dunia.

Walaupun Amerika Serikat adalah negara superpower, perimbangan kekuatan tahun 1970-an di Asia-Pasifik itu kurang menguntungkan posisinya akibat lokasi geostrategi Uni Soviet dan kekuatan militernya di kawasan ini. Sebaliknya faktor geostrategis dan militer Uni Soviet itu membentuk peranannya secara meyakinkan dalam perimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik. Asimetri kekuatan ini turut ditentukan oleh hubungan yang kurang baik antara Amerika Serikat dan Jepang dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan. Dalam bidang ekonomi Amerika Serikat menginginkan super Jepang menghapuskan bermacam-macam perlindungan non-tarif, termasuk peraturan administrasi dan akses ke pasarangan harus dikurangi dengan sikeras bahwa ketidakseimbangan perdagangan harus dikurangi dengan lawan tekanan-tekanan kelompok proteksionis-proteksionis di Amerika Serikat.

Kalau keadaan ekonomi Jepang pada awal tahun 1980 dibandingkan dengan keadaan ekonominya pada tahun 1960 ketika Perjanjian Keamanan Kedua Amerika Serikat-Jepang ditandatangani, maka Jepang seharusnya menerima tuntutan Amerika Serikat itu. Pertama, pendapatan nasional Amerika Serikat pada tahun 1960 sekarang meningkat menjadi 50%, sedangkan perdagangannya meningkat dari US\$ 267 juta menjadi US\$ 24,6 miliar tahun 1978. Sebaliknya dari surplus perdagangan US\$ 4,9 milyar, perdagangan Amerika Serikat sekarang menderita defisit sebesar 10 milyar. Gejala-gejala ekonomi ini mungkin terus berlangsung di dua atau tiga kali dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang sama mendatar.

Mengenai hubungan Amerika Serikat-Jepang selama ini, tampaknya di Amerika Serikat terdapat suatu konsensus bahwa keterikatannya di kawasan Asia-Pasifik terletak pada hubungan politik, ekonomi dan keamanan dengan Jepang. Di lain pihak Jepang diperkirakan kurang peka terhadap konsensus itu dan perlindungan keamanan yang diperolehnya secara "cuma-cuma" dari Amerika Serikat. Sikap ini tercermin dalam beberapa kejadian internasional yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan Amerika Serikat: *pertama*, Jepang pada tahun 1973 karena minyak mengambil sikap pro-Arab yang eksplisit dalam politik Timur Tengahnya; *kedua*, sementara intervensi Uni Soviet berlangsung di Afghanistan, Perdana Menteri Ohira pada awal tahun 1980 mengatakan kepada *Asahi Shimbun* bahwa Uni Soviet bukan suatu negara yang ofensif, walaupun pernyataan ini kemudian diimbangi oleh resolusi DIET Jepang yang mengutuk intervensi tersebut.

Dalam bidang keamanan Jepang sejak lama meragukan kemauan Amerika Serikat untuk mempertahankan perimbangan kekuatan di kawasan ini, sehubungan dengan kebijakan militer Presiden Nixon tahun 1969 dan rencana Presiden Carter untuk menarik Divisi Kedua Amerika Serikat dari Korea Selatan. Meskipun rencana Presiden Carter itu dibatalkan, kebijakan militer itu mengurangi kekuatan Amerika Serikat di Asia dan Jepang dari 250.000 (1964) menjadi 130.000 dan 240.000 (1952) menjadi 48.000 serdadu. Kalau kekuatan pasukan-pasukan Amerika Serikat di daratan Asia dan Okinawa dikurangi, maka sebagai imbalan Amerika Serikat seharusnya meningkatkan kapabilitas kekuatan-kekuatan sekutu-sekutunya di Asia-Pasifik. Akan tetapi bertentangan dengan itu Amerika Serikat menurunkan dan membatasi program bantuan keamanan regional, penjualan perlengkapan militer dan latihan untuk perwira-perwira asing.¹ Dampak kebijakan militer Amerika Serikat ini tercermin dalam hasil pengumpulan pendapat umum yang diadakan menjelang akhir tahun 1978 sebelum krisis Iran dan Afghanistan, bahwa 56% masyarakat Jepang tidak lagi mempercayai perlindungan Amerika Serikat.

Keragu-raguan Jepang itu meningkat dengan bergesernya situasi strategi di Asia yang secara geostrategis menguntungkan Uni Soviet. Dalam kurang lebih dua tahun terakhir ini, Uni Soviet telah menempatkan kapal induk Minsk di Cam Ranh Bay (September 1980) dan Teluk Muangthai (Nopember 1980) dan mengadakan penerbangan pesawat mata-mata TU-95D yang berpangkalan di Da Nang ke wilayah udara Filipina (April 1980). Uni Soviet juga telah menggelar pasukan tempurnya di Kepulauan Kurile yang diambilnya dari Jepang dalam tahun 1945, mengadakan persekutuan militer dengan Vietnam dan meningkatkan bantuan militer untuk India. Semuanya ini mempengaruhi per-

¹Lihat Richard H. Solomon, *Choices for Coalition-Building: The Soviet Presence in Asia and*

imbangan militer di kawasan dan keamanan jalur-jalur komunikasi laut Jepang. Akan tetapi *Buku Putih* Pertahanan Jepang Tahun 1979 tidak memuat perbaikan-perbaikan penting dalam rencana pertahanan jangka panjang Jepang untuk menghadapi perubahan-perubahan strategis tersebut.¹

Di lain pihak, persekutuan yang tercakup dalam jaminan perlindungan Amerika Serikat untuk Jepang rupanya tidak membantu Amerika Serikat menghadapi Uni Soviet di kawasan ini. Dari tahun 1975 ketika kaum komunis berhasil memperkuat dominasinya di Indocina sampai tahun 1981, strategi Amerika Serikat untuk mengimbangi Uni Soviet dibatasi oleh kelambanan Jepang meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Akibat sistem perlindungan itu dan konstitusinya yang melarang peningkatan kekuatan militer, Jepang tidak siap untuk membantu Amerika Serikat memainkan peranan keamanan regional ataupun melindungi jalur-jalur perdagangannya. Sebaliknya setiap konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan ini akan menyeret Jepang ke dalamnya. *Pertama*, Amerika Serikat dan Uni Soviet masing-masing mempunyai kekuatan militernya di kawasan Asia-Pasifik. *Kedua*, Jepang secara geostrategis menguasai tiga selat penting yang merupakan jalan ke luar Armada Pasifik Uni Soviet ke Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yaitu Selat Tsugaru, Selat La Perouse dan Selat Tsushima. *Ketiga*, terdapat fasilitas-fasilitas pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat di Jepang.

Menjelang tahun 1980-an terjadi pergeseran strategi di Asia-Pasifik. Tampaknya Jepang menyadari kelemahan kebijakan "Yen dimensional" yang di-anutnya sejak Perang Dunia II sampai dasawarsa 1970-an. Diperkirakan bahwa tiga kejadian penting di kawasan mempengaruhi perubahan kebijakan Jepang ini. *Pertama*, kejadian di kawasan Timur Tengah, yaitu pecahnya Revolusi Islam Iran yang disusul jatuhnya Shah Iran dan penyanderaan warga Amerika di Teheran. Revolusi Iran ini mengungkapkan kelemahan posisi Amerika Serikat di Timur Tengah. *Kedua*, pergolakan yang terus berlangsung di Indocina dan Semenanjung Korea. *Ketiga*, invasi Uni Soviet ke Afghanistan bulan Desember 1979. Dampak kejadian-kejadian di ketiga kawasan vital ini mendorong Jepang untuk menentukan diplomasinya terhadap negara sahabat yang vital dan negara lawan yang potensial. Secara demikian Jepang menyadari bahwa kecenderungan selama ini sebagai pelaku yang netral harus ditinggalkan, tetapi sebaliknya hubungan dengan Amerika Serikat perlu ditingkatkan. Tampaknya Jepang menyadari bahwa tanpa suatu hubungan yang stabil dengan Amerika Serikat, maka kebijakan-kebijakan lain tidak akan berfungsi secara efektif. Perubahan pandangan ini terungkap dalam laporan tahunan

¹Lihat "Japanese White Paper on Defense 1979," *Survival* (London: IISS), Januari/Pebruari 1980, hal 31-36.

diplomatik *Buku Putih* Kementerian Luar Negeri Jepang yang menolak kebijakan sebelumnya dan menyarankan supaya Jepang membuat pilihan-pilihan yang sukar dan bersedia berkorban untuk masa depan. Pandangan ini mencerminkan bahwa Jepang harus memikul tanggung jawab internasional sebagai negara yang mempunyai kekuatan ekonomi global dan sebagai anggota dunia bebas. Apabila Jepang harus memikul suatu tanggung jawab internasional, maka hubungan dengan Barat dan terutama Cina perlu ditingkatkan.

Dalam kaitan ini terdapat beberapa alasan yang sifatnya spekulatif. *Pertama*, berkat detente Amerika Serikat-Cina yang berkembang pesat sejak permulaan tahun 1970-an Cina menjadi negara kawan bagi Jepang. Secara demikian pasaran industri Jepang dapat dialihkan ke Cina, sehingga kompetisinya dengan Amerika Serikat berkurang. *Kedua*, detente Amerika Serikat-Cina menggeser Amerika Serikat dari persepsi ancaman Cina dan menempatkan Uni Soviet sebagai musuh utama Cina. Bagi Cina persekutuan Amerika Serikat-Jepang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan modernisasi dan membentuk suatu front bersama anti Uni Soviet. Sesuai dengan itu dua hari setelah penandatanganan Persahabatan Cina-Jepang bulan Agustus 1978, redaksi *Harian Rakyat* menjelaskan arti anti Uni Soviet pasal anti hegemoni dalam perjanjian yang baru itu.¹

Tercapainya perjanjian perdamaian Jepang-Cina itu menguntungkan Amerika Serikat baik sebagai suatu faktor stabilisasi politik di Asia maupun sebagai suatu unsur positif dalam strategi pembendungan globalnya terhadap Uni Soviet. Oleh karena itu segera sesudah invasi Uni Soviet ke Afghanistan bulan Desember 1979, Amerika Serikat memperkuat tuntutanannya agar Jepang meningkatkan anggaran pertahanannya. Desakan Amerika Serikat itu berhasil seperti terungkap dalam kesediaan Jepang untuk menaikkan anggaran pertahanan militernya menjadi 0,91% dari GNP-nya. Dalam jangka pendek, Jepang merencanakan untuk meningkatkan pengeluaran anggaran pertahanannya 0,02% per tahun selama lima tahun kemudian. Ini berarti bahwa anggaran pertahanannya akan meningkat dari 0,9% sekarang menjadi 1% pada tahun 1985.

Dilihat dari segi militer, kenaikan anggaran pertahanan ini jauh di bawah standar, tetapi dalam arti tertentu penting bagi perkembangan kebijakan pertahanan Jepang dan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. *Pertama*, dasawarsa 1980-an mengalami suatu evolusi konsepsi peranan keamanan dan misi yang ditanggung secara bersama, jika Perjanjian Keamanan tetap dalam kerangka kerja sama pertahanan yang semula. *Kedua*, Amerika Serikat dapat

melakukan kerja sama dalam rangka pertahanan dan latihan militer dengan Jepang sehingga mampu memindahkan kekuatannya ke kawasan lain dalam keadaan darurat. Kemampuan memindahkan kekuatan ini akan memperkuat "strategi mobil" (swing strategy) Amerika Serikat dalam tahun 1980-an. *Ketiga*, dengan mengembangkan kekuatan pertahanan konvensionalnya Jepang mampu mengawasi jalur-jalur udara dan laut di Pasifik Barat secara lebih luas. *Keempat*, secara politis Jepang didorong untuk berpartisipasi dalam aliansi pertahanan informal negara-negara di Asia-Pasifik dan secara tidak langsung akan melibatkan ekspansi kapabilitas-kapabilitas militer dan bantuan ekonominya untuk menggantikan bantuan-bantuan Amerika Serikat atau Uni Soviet terhadap beberapa negara genting di kawasan ini.

Kalau perkiraan di atas tepat, maka dapat dibayangkan bahwa militerisme Jepang dapat dihidupkan kembali tanpa mengubah undang-undang dasarnya. Walaupun konsep entente militer Amerika Serikat-Jepang-Cina ini menemui hambatan-hambatan yang sukar diatasi, para pembuat keputusan di Washington berkepentingan untuk melihat perubahan situasi di Asia-Pasifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa perimbangan kekuatan di Asia-Pasifik dalam tahun 1980-an merupakan transformasi perimbangan kekuatan dasawarsa 1970-an.

Dalam kaitan ini, Moskow dihadapkan pada prospek pergeseran yang mendasar dalam perimbangan kekuatan di Asia-Pasifik: (1) persekutuan Amerika Serikat-Cina de facto; (2) persenjataan Jepang kembali; (3) ketegasan kebijakan Amerika Serikat untuk menjalankan strategi pembendungan, yang mencakup Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN, Australia dan Selandia Baru.

Kegagalan Uni Soviet untuk memperbaiki hubungannya dengan Cina dan mencegah ekspansi hubungan Cina dengan Amerika Serikat dan Jepang diperkirakan fatal bagi kebijakannya di Asia-Pasifik. Hal ini adalah akibat ketidakluwesannya kebijakan yang dianutnya terhadap Cina setelah peristiwa di Sungai Ussuri bulan Maret 1969. Dalam tahun 1965, kekuatan Uni Soviet di perbatasan Cina-Uni Soviet adalah sekitar 20 divisi angkatan darat dan sejak peristiwa itu Moskow menunjukkan suatu sikap yang berlebihan terhadap ancaman Cina dengan meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran menjadi 52 divisi, 80 kapal perang utama di Armada Pasifik dan 800 senjata nuklir strategis jarak menengah di perbatasan Cina-Uni Soviet (lihat Tabel 1). Di samping itu Uni Soviet juga memusatkan diplomasinya untuk menekan pengaruh Cina di seluruh Asia yang secara formal ditandai dengan usul pembentukan sistem keamanan bersama Asia bulan Juni 1969. Meskipun usul itu tidak mendapat tanggapan dari negara-negara Asia, Uni Soviet berhasil memperluas ikatannya di kawasan ini dengan menarik India dalam perjanjian per-

Tabel 1
**PENINGKATAN KEKUATAN DARAT DAN KEKUATAN LAUT UNI SOVIET
 DI TIMUR JAUH ANTARA 1965 DAN 1981**

	1965	1981
Serdadu	150.000	435.000
Divisi angkatan darat	20	52
Tank	4.000	13.000
Artileri	1.500	8.000
Helikopter tempur	—	650
Kapal perang utama	50	80
Senjata taktis nuklir ¹	100	1.500
Senjata nuklir jarak menengah ²	400	800

Keterangan: ¹ Termasuk kekuatan pesawat tempur dan artileri.
² Termasuk kekuatan pesawat tempur dan rudal.

Sumber: *Foreign Report* (London), 2 Desember 1982, hal. 6.

adalah keberhasilannya memanfaatkan perang Indocina kedua dengan menggeser Cina dari Vietnam. *Pertama*, Uni Soviet mampu menawarkan bantuan ekonomi untuk pembangunan kembali Vietnam setelah perang. *Kedua*, faktor sejarah dan geografis Uni Soviet lebih menguntungkan Vietnam daripada Cina. Berdasarkan perkiraan tersebut, maka Vietnam bersedia menandatangani perjanjian persahabatan dengan Uni Soviet bulan Nopember 1978. Penandatanganan perjanjian antara Hanoi dan Moskow ini mencerminkan kemauan dan kemampuan pemerintah di Moskow untuk membuat suatu pilihan politik yang menentukan baik politis maupun militer. Strategi Moskow ini merugikan kebijakan luar negerinya seperti tercermin dalam posisinya yang semakin menurun di negara-negara Asia non-komunis.

Kebijakan Uni Soviet terhadap Jepang juga kaku. Sumber ketegangan hubungan antara Jepang dan Uni Soviet adalah hampir sama dengan sumber ketegangan Cina-Uni Soviet, yaitu wilayah, sejarah, ideologi dan ekonomi. Diperkirakan bahwa sumber ketegangan yang utama adalah masalah wilayah, karena Uni Soviet tetap menolak mengembalikan beberapa pulau yang didudukinya setelah Perang Dunia II. Sebaliknya dalam tiga tahun terakhir ini Uni Soviet memperkuat posisinya dengan menggelar dua divisi di Sakhalin dan beberapa divisi di perbatasan sebelah utara Jepang.

Secara militer, pemusatan kekuatan Angkatan Darat Uni Soviet di

pakan suatu ancaman terhadap Jepang. Suatu proyeksi kekuatan ke Hokkaido hanya dapat dilakukan jika Uni Soviet mampu mendobrak pertahanan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Jepang di Laut Okhotsk dan Laut Jepang. Misi ini membutuhkan suatu kapabilitas ampibi yang tinggi dan mobil. Uni Soviet diperkirakan hanya mempunyai 85 kapal ampibi dalam inventaris angkatan launya dan hanya satu yang mempunyai bobot mati 10.000 ton, yakni LPD Ivan Rogov, sedangkan sisanya terdiri dari kelas LST dan LSM dengan bobot mati antara 1.000 - 4.000 ton. Berdasarkan komposisi ini diperkirakan bahwa kemampuan proyeksi kekuatan ke darat dari Armada Pasifik yang terdiri dari 1 LPD Ivan Rogov dan 9 LST hanya mampu mendaratkan sekitar 3.000 - 4.000 serdadu infanteri angkatan laut.

Kelemahan kapabilitas angkut ampibi ini tidak diimbangi dengan angkutan udara yang kuat. Kekuatan angkutan udara Uni Soviet di Timur Jauh relatif kecil dan hanya mampu mengangkut satu atau dua resimen. Untuk mengangkut satu atau dua divisi pasukan melalui udara, maka Uni Soviet harus memobilisasi semua kekuatan armada angkutan udara AN-12 dan IL-76 secara serentak. Hal ini adalah tidak mungkin. Jadi Uni Soviet tidak dapat melakukan proyeksi kekuatan ke darat maupun menguasai lautan dan udara terhadap Jepang. Tetapi penggelaran-penggelaran kekuatan militer Uni Soviet yang provokatif termasuk pengoperasian kapal mata-matanya ke perairan Jepang dan sikapnya terhadap kapal-kapal penangkap ikan Jepang di perairan sebelah utara, dieksploitasi oleh Jepang dan Amerika Serikat secara politis sebagai ancaman regional. Sebaliknya Uni Soviet tidak menganggap Jepang sebagai ancaman terhadap keamanannya pada saat sekarang, tetapi prospek militarisme dan potensi Jepang terlebih-lebih sehubungan dengan pendekatan dan Perjanjian Perdamaian Cina-Jepang bulan Agustus 1978 serta berakhirnya Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama Cina-Uni Soviet setahun kemudian sangat mempengaruhinya.

Usaha-usaha Uni Soviet untuk meningkatkan kekuatan militernya di Timur Jauh dapat dilihat sebagai usaha untuk mengimbangi entente militer Amerika Serikat-Cina-Jepang. *Pertama*, Uni Soviet menambah beberapa divisi angkatan darat yang dilengkapi dengan tank jenis T-80, artileri roket dan rudal anti-tank. *Kedua*, Penerbangan Depan dan Kekuatan Pertahanan Udara akan diperkuat dengan penempatan AWACS pada pertengahan tahun 1980-an. *Ketiga*, Armada Pasifik akan diperkuat dengan kapal-kapal kelas SSGN Oscar, CGN Kirov dan SSB Alfa. Satuan-satuan kapal perusak rudal jelajah yang baru seperti Sovremenyy dan Udaloy selain digunakan untuk operasi ampibi juga berperan sebagai landasan utama Perang Anti Kapal Selam.¹ Di sam-

¹Department of Defense of USA, *Soviet Military Power*, U.S. Government Printing Office,

ping itu Armada Pasifik akan diperkuat dengan satu kapal induk pesawat tempur pada akhir tahun 1980-an. *Keempat*, Kekuatan Strategis yang sekarang terdiri dari 110 IRBM/MRBM akan diperkuat daya tempurnya dengan tambahan 200 SS-20 (600 kepala nuklir) yang mampu mencapai sasaran di Cina.

KESIMPULAN

Usaha-usaha tersebut di atas mengungkapkan bahwa Uni Soviet melihat situasi di kawasan Asia-Pasifik sebagai tidak menentu dan oleh karena itu merasa perlu membangun suatu kapabilitas tempur yang independen di Siberia untuk menghadapi setiap kemungkinan konflik dengan Amerika Serikat dan Cina. Di samping itu Uni Soviet memperhitungkan kemungkinan konflik dalam skala yang lebih kecil dengan Jepang, di Semenanjung Korea dan intervensi Cina di Vietnam.

Opsi strategi militer ini kiranya cukup beralasan, karena jika Amerika Serikat melaksanakan taktik perang yang menghabiskan tenaga lawan di medan Eropa dan mungkin menerima doktrin "airland battle" angkatan darat yang baru (dituangkan dalam U.S. Army Field Manual 100-5, Oktober 1982), maka Uni Soviet masih mempunyai kapabilitas tempur di Timur. Kapabilitas militer dalam Kategori I dan Kekuatan Strategis SS-20 juga akan berfungsi sebagai penangkal terhadap Cina dan Jepang untuk merebut kembali wilayah mereka yang masih dikuasai Uni Soviet.

Tampaknya strategi pembendungan Amerika Serikat di Asia-Pasifik dalam dasawarsa 1980-an mendorong Uni Soviet untuk mengimbanginya dengan menerapkan "strategi dua perang": perang di Barat dan perang di Timur. Yang lebih menonjol lagi dalam perimbangan kekuatan di Asia-Pasifik adalah penggelaran SS-20 dan pembom Backfire Uni Soviet akan mendorong Amerika Serikat untuk menempatkan rudal-rudal taktis yang lebih akurat di wilayah ini, seperti diusulkan oleh Panglima Tertinggi Komando Pasifik Robert Long kepada Kongres pada tanggal 16 Maret 1982. Interaksi militer Uni Soviet-Amerika Serikat ini akan mempengaruhi perimbangan kekuatan nuklir di kawasan Asia-Pasifik.

Suatu kehadiran militer Amerika Serikat yang kuat di Pasifik Barat dan di Samudra Hindia dan kapabilitas militer Jepang yang telah ditingkatkan akan mengurangi atau menekan kecenderungan-kecenderungan negara-negara di kawasan ini untuk membentuk suatu pengaturan keamanan militer yang baru di luar status quo sekarang. Tetapi perkembangan yang disebabkan oleh "strategi koalisi" Amerika Serikat-Jepang itu diperkirakan akan menciptakan